

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan merupakan suatu indikator bahwa terjadi suatu pertumbuhan perekonomian kearah yang lebih baik. Adapun teori pembangunan yang digolongkan kedalam dua kategori yaitu teori modernisasi dan teori struktural. (Hudiyanto, 2003:77). Teori modernisasi menjelaskan bahwa kemiskinan suatu negara timbul akibat dari masalah internal dari negara tersebut. Sedangkan teori struktural fokus terhadap pembahasan mengenai dampak kemiskinan yang timbul dari faktor eksternal. Pembangunan dapat terlihat dari peningkatan pendapatan masyarakat, kemiskinan dan pengangguran yang berkurang. Pemberlakuan UU RI No 32 dan 33 Tahun 2004 memberikan kebebasan pemerintah daerah untuk memajukan daerah melalui langkah kebijakan yang diambil. Kebebasan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan perekonomian didaerah. Akan tetapi kebebasan ini harus tepat sasaran agar keputusan yang diambil pemerintah tidak mengalami kegagalan.

Ketimpangan pembangunan di beberapa daerah timbul akibat adanya perbedaan keadaan geografis, infrastruktur yang tersedia, dan pengelolaan yang belum maksimal. Ketimpangan yang dimaksud seperti ledakan penduduk yang terpusat, pengangguran, kemiskinan serta dampak sosial seperti rasa aman. Dari data BPS diketahui jumlah penduduk, investasi dan angka kemiskinan mempengaruhi penerimaan PDRB.

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Dikalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia (Maier dalam Mudrajat Kuncoro dalam Adhi Saputra, Whisnu, 2011).

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2011 di Jawa Tengah

No	Kabupaten	Tahun	
		2012	2013
1	Kab. Cilacap	1.679.864	1.676.089
2	Kab. Banyumas	1.603.037	1.605.579
3	Kab. Purbalingga	877.489	879.880
4	Kab. Banjarnegara	890.962	889.921
5	Kab. Kebumen	1.181.678	1.176.722
6	Kab. Purworejo	708.483	705.483
7	Kab. Wonosobo	771.447	769.318
8	Kab. Magelang	1.219.371	1.221.681
9	Kab. Boyolali	953.317	951.817
10	Kab. Klaten	1.153.047	1.148.994
11	Kab. Sukoharjo	848.718	849.506
12	Kab. Wonogiri	946.373	942.377
13	Kab. Karanganyar	838.762	840.171
14	Kab. Sragen	875.283	871.989
15	Kab. Grobogan	1.339.127	1.336.304
16	Kab. Blora	847.125	844.444
17	Kab. Rembang	608.548	608.903
18	Kab. Pati	1.219.993	1.218.016

Lanjutan Tabel 1.1

19	Kab. Kudus	807.005	810.810
20	Kab. Jepara	1.144.916	1.153.213
21	Kab. Demak	1.091.379	1.094.472
22	Kab. Semarang	968.383	974.092
23	Kab. Temanggung	730.720	731.911
24	Kab. Kendal	926.325	926.812
25	Kab. Batang	728.578	729.616
26	Kab. Pekalongan	861.366	861.082
27	Kab. Pemalang	1.285.024	1.279.596
29	Kab. Tegal	1.421.001	1.415.009
29	Kab. Brebes	1.770.480	1.764.648
30	Kota Magelang	120.447	119.935
31	Kota Surakarta	509.576	507.825
32	Kota Salatiga	177.480	178.594
33	Kota Semarang	1.629.924	1.644.800
34	Kota Pekalongan	290.347	290.870
35	Kota Tegal	244.632	243.860
<b>Jumlah</b>		<b>33.270.207</b>	<b>33.264.339</b>

Sumber: BPS Jawa Tengah publikasi tahun 2012 dan 2013

Tabel 1.1 mengenai jumlah penduduk tahun 2012 dan 2013 diatas menunjukkan bahwa dari 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah Kabupaten Brebes memiliki jumlah penduduk paling banyak tahun 2012 sebesar 1.770.480 jiwa dan tahun 2013 1.764.648. Apabila dilihat dari besaran penurunan jumlah penduduk paling banyak adalah Kabupaten Tegal tahun 2012 sebesar 1.421.001 jiwa dan tahun 2013 1.415.009 jiwa dengan besar penurunan sebanyak 5.992 jiwa. Kota Semarang mengalami peningkatan jumlah penduduk paling besar yaitu tahun 2012 berjumlah 1.629.924 jiwa dan tahun 2013 berjumlah 1.644.800 jiwa dengan besar peningkatan jumlah penduduk 14.876 jiwa. Selama periode tahun 2012-2013 terjadi penurunan penduduk sebesar 5.868 jiwa.

Berbagai kebijakan untuk mengatasi kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi kebijakan tersebut belum mampu menekan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan (Sudrajad,Wahyu, 2014).

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Perkotaan/Perdesaan di Jawa Tengah  
Tahun 2013-2014

Daerah	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		Presentase Penduduk Miskin (persen)	
	2013	2014	2013	2014
Perkotaan	1.870,73	1.771,53	12,53	11,50
Perdesaan	2.834,14	2.790,29	16,05	15,35
Kota+Desa	4.704,87	4.561,83	14,44	13,58

Sumber: BPS berita resmi statistik 2013 dan 2014

Tabel 1.2 diatas menunjukkan data kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan perkotaan yaitu 2.834,14 ribu jiwa dan 1.870,73 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 0,86 persen atau 143,04 ribu jiwa. Garis Kemiskinan di Jawa Tengah menurut data BPS kondisi September 2013 sebesar Rp 261.881,00 per kapita per bulan. Daerah perkotaan Garis Kemiskinan September 2013 sebesar Rp 268.397,00 per kapita per bulan atau naik 5,34 persen. Garis Kemiskinan di perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 9,00 persen menjadi sebesar Rp 256.368,00 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan di Jawa Tengah kondisi September 2014 sebesar Rp 281.570,00 per kapita per bulan. Daerah perkotaan

Garis Kemiskinan untuk bulan September 2014 sebesar Rp 286.014,00 per kapita per bulan atau naik 2,50 persen. Garis Kemiskinan di pedesaan juga mengalami peningkatan sebesar 3,66 persen menjadi sebesar Rp 277.802,00 per kapita per bulan (BPS, 2014).

Wongdesmiwati dalam Sudrajad, Wahyu (2014) menyatakan proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan walaupun pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan.

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah (Adhi Saputra, Whisnu, 2011).

Tabel 1.3

Nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah Triwulan III 2013 dan Triwulan III 2014 Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Triwulan III 2013	Triwulan III 2014
1.	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	9.988,4	9.761,8
2.	Pertambangan dan Penggalian	639,7	677,7
3.	Industri Pengolahan	18.416,4	19.734,0
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	498,1	528,0
5.	Konstruksi	3.415,1	3.562,0
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	12.674,8	13.705,8
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	3.127,4	3.364,0
8.	Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	2.320,0	2.492,3
9.	Jasa- Jasa	5.823,6	6.178,6
	<b>Jumlah</b>	<b>56.903,5</b>	<b>60.004,2</b>

Sumber: BPS berita resmi statistik triwulan III tahun 2013

Tabel 1.3 mengenai perekonomian Jawa Tengah pada triwulan III tahun 2014 dibandingkan dengan triwulan III tahun 2013 mengalami pertumbuhan 5,4 persen. Sektor yang tidak mengalami pertumbuhan adalah sektor pertanian dari 9.988,4 milyar rupiah menjadi 9.761,8 milyar rupiah. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan paling tinggi diantar sektor lain yaitu sebesar 12.674,8 milyar rupiah menjadi 13.705,8 milyar rupiah.

Kabupaten lain meskipun mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang positif, untuk lebih meningkatkan PDRB agar hasilnya optimum diperlukan pemilihan sektor-sektor yang diprioritaskan sehingga dapat menggunakan potensi ekonomi daerah secara optimal terutama bagi daerah-daerah yang potensi dimilikinya belum dimanfaatkan secara baik. Sektor-sektor yang dapat

diunggulkan oleh setiap daerah merupakan sektor basis, punya keunggulan kompetitif serta mempunyai spesialisasi bagi daerah yang bersangkutan (Mangun, Nudiatulhuda, 2007).

Melalui PDRB dapat diketahui mengenai potensi-potensi yang dimiliki daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan ekonomi (Erawati, N.K dan Mahendra Yasa, 2012). Selain itu PDRB dapat digunakan untuk mengetahui sektor unggulan dari satu wilayah serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia (Wahyuningtiyas, Rosita, 2013). Semakin besar peranan sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah yang tinggi semisal sektor industri terhadap pertumbuhan PDRB disuatu wilayah, semakin tinggi pula pertumbuhan PDRB diwilayah tersebut (T.H Tambunan, Tulus, 2001).

Kabupaten Klaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kabupaten yang sedang mengalami peningkatan pendapatan PDRB. Kabupaten Klaten terletak diantara Provinsi Yogyakarta dan Kabupaten Surakarta mengakibatkan pendapatan sektor perdagangan, perhotelan dan restoran menjadi penyumbang terbesar yaitu 1.665.715,19. Sedangkan sektor yang tidak berpotensi di Kabupaten Klaten adalah sektor listrik, gas dan air yaitu sebesar 48.181,62. Penyebab kecilnya pendapatan sektor ini adalah Kabupaten Klaten tidak memiliki waduk atau danau sebagai sumber listrik dan air. Sektor pertambangan dan penggalan Kabupaten Klaten sangat sedikit yaitu 72.403,71 sebab tidak adanya sumber tambang yang terkandung di wilayah Kabupaten Klaten. Dekatnya jarak Provinsi Yogyakarta dan Kabupaten Surakarta menyebabkan terjadi pergerakan

keluar untuk bekerja di Yogyakarta dan Surakarta. Hal ini mengakibatkan beberapa sektor ekonomi yang berpotensi lainya tidak maksimal.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk, investasi, dan angka kemiskinan mempengaruhi jumlah penerimaan PDRB Kabupaten Klaten. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Sektor Unggulan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2009-2013 di Kabupaten Klaten*”.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Penelitian ini fokus terhadap penentuan sektor unggulan di Kabupaten Klaten untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan. Data yang digunakan data sekunder PDRB atas harga konstan di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Klaten ada tiga yaitu analisis *Location Quotient (LQ)* guna mengetahui sektor basis dan non basis sehingga pemerintah mampu memprioritaskan sektor mana yang harus diperhatikan oleh pemerintah, analisis *Shift Share* digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi suatu daerah sebagai perubahan atau peningkatan suatu indikator pertumbuhan perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, serta *Klassen Typologi* yang dapat digunakan untuk mengetahui pola pertumbuhan sektor ekonomi.



### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan ekonomi serta sektor unggulan melalui PDRB maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Sektor-sektor ekonomi apa saja yang menjadi basis dan non basis melalui analisis LQ untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten?
2. Sektor- sektor apa saja yang mampu mempengaruhi pola struktur ekonomi melalui analisis Shift-share dan Tipologi Klassen?

### **D. Tujuan Penelitian**

Melalui latar belakang diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis dan non basis melalui analisis *LQ* untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui sektor-sektor yang mampu mempengaruhi pola struktur ekonomi melalui analisis *shift-share* dan *tipologi klassen*.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil kajian penelitian ini di masa yang akan datang di Kabupaten Klaten dan negara Indonesia pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Empiris

Penelitian ini sudah cukup banyak dilakukan dan diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Metodologis

Penelitian ini menggunakan data sekunder PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas harga konstan dipilih untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi faktor harga. PDRB atas dasar harga konstan dapat menunjukkan nilai tambah yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menentukan spesialisasi yang memberi dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi diwilayahnya.